

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Fokus dari penelitian ini terdapat pada perubahan mekanisme penyaluran Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) yang mana diawal berlangsung secara non tunai. Tetapi, sekarang telah berubah menjadi tunai dan untuk mengetahui bagaimana manfaat yang diterima masyarakat terkait perubahan peraturan tersebut masyarakat tidak harus datang untuk menukarkan saldo yang terdapat pada kartu elektronik dengan bahan pangan yang tersedia di E-Warong yang sudah bekerjasama dengan pemerintah.

BPNT menggantikan penyaluran beras secara langsung yang ditebus dengan sejumlah uang menjadi program bantuan pangan dalam kartu elektronik yang berisi uang. Dengan kartu elektronik tersebut masyarakat penerima BPNT akan dibebaskan untuk membeli kebutuhan pokok yang diinginkan (Irwan Susanto, ,2019)

Berdasarkan PERMENSOS No. 11 Tahun 2018, (BPNT) merupakan jenis bantuan yang diberikan pada masyarakat sebagai ganti dari program Rastri menjadi BPNT yang dibagikan non-tunai pada keluarga penerima manfaat (KPM) perbulannya hanya dapat dipergunakan untuk membeli sembako dan kebutuhan pokok dan rumah tangga. Pencairan dana bantuan sosial dapat dilakukan di Elektronik Warung Gotong Royong (E-Warong) atau agen yang telah bekerjasama dengan himpunan bank negeri (Himbara) dari pemerintah

terkait pendistribusian bantuan pangan secara non tunai (Rosalina, Ana dan Hardjati, 2019).

Tujuan dari program BPNT yang diberikan pemerintah adalah, mengupayakan pengurangan keuangan pokok keluarga yang termasuk KPM dengan cara memberikan bantuan sembako yang berguna untuk mereka dan tetap mengkonsumsi pangan yang layak atau mendapat gizi yang baik, meratakan ketepatan sasaran untuk warga yang menerima bantuan ini, serta memberi opsi bagi masyarakat yang termasuk KPM terkait jenis-jenis apa yang mereka perlukan untuk dibantu dalam hal pemenuhan keperluan pokok untuk tetap membantu masyarakat demi tercapainya pembangunan yang berlanjut.

Besaran BPNT pada awal dikeluarkannya program BPNT adalah Rp110.000/KPM/bulan yang kemudian pada awal tahun 2020 berubah menjadi Rp150.000/KPM/bulan dan pada bulan Maret–Agustus jumlah saldo dikartu elektronik bertambah menjadi Rp200.000/KPM/bulan, saldo tersebut hanya dapat ditukarkan dengan bahan-bahan pokok rumah tangga, apabila penerima bantuan tidak membelanjakan bantuan pada E-Warong maka bulan berikutnya bantuan dianggap hangus atau tidak dapat diambil lagi. Selain itu dalam penyaluran bantuan pangan diharapkan mewujudkan prinsip 6T dalam penyaluran bantuan pangan, prinsip 6T dalam penyaluran bantuan pangan, prinsip 6T yang dimaksud adalah Tepat sasaran, Tepat waktu, Tepat jumlah, Tepat kualitas, Tepat harga dan tepat administrasi.

Atas arahan presiden pada rapat terbatas yang membahas tentang percepatan dalam penyaluran program BPNT pada tanggal 15 Februari 2022,

Kementerian sosial mengeluarkan Juknis Nomor 29/6/SK/HK.01/2/2022 tentang petunjuk teknis percepatan penyaluran BPNT periode tahun 2022, disalurkan secara tunai melalui PT. POS Indonesia dan Juknis tersebut menjadi payung hukum dan untuk meningkatkan efektivitas, efisiensi, transparansi dan akuntabilitas dalam penyaluran BPNT tersebut.

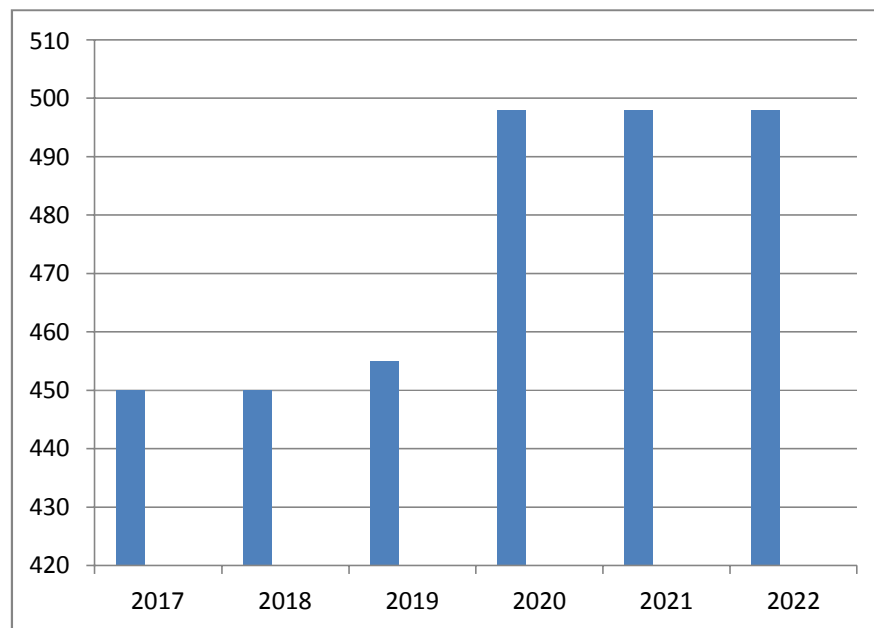
Pemerintah memiliki kepedulian terhadap penanggulangan kemiskinan secara khusus dituangkan dalam peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia No. 25 Tahun 2016 tentang bantuan pengembangan sarana usaha melalui elektronik warung pada pasal 1 ayat 1 “penanganan fakir miskin adalah upaya yang terarah, terpadu dan berkelanjutan yang dilakukan pemerintah, pemerintah daerah dan masyarakat dalam bentuk kebijakan, program, serta fasilitas untuk memenuhi kebutuhan dasar setiap warga negara”

Melalui BPNT adalah salah satu langkah yang ditempuh pemerintah dalam meningkatkan kondisi kesejahteraan masyarakat serta membantu masyarakat yang tergolong dalam perekonomian lemah, akan tetapi selama kurang 4 tahun berjalannya BPNT dilingkungan masyarakat, penyaluran bantuan ini masih dikatakan kurang efisien, dikarenakan kurang tepat sasaran, mekanisme penyaluran bantuan pangan sekarang berubah.

Kecamatan Siempat Nempu Hilir kabupaten Dairi menerima bantuan program (BPNT) sebanyak 450 (KPM) pada tahun 2017 dan terjadi peningkatan pada tahun 2020 sampai tahun 2022 yakni sebesar 498 (KPM), yang terbagi di 10 desa, dan terdapat 5 E-warong yang tersebar diantaranya terdapat didesa Sopobutar dan di desa Janji.

Hasil pra penelitian yang sudah dilakukan di kantor camat Siempat Nempu Hilir maka data penerima dan jumlah penduduk ditiap-tiap desa yang berada dikecamatan Siempat Nempu Hilir dapat dilihat pada tabel berikut:

Gambar 1.1
Jumlah penerima (KPM) dari Tahun 2017 S/d 2022.



Dari diagram diatas terjadi peningkatan penerima (KPM) dikarenakan pada tahun 2020 terjadi pandemi Covid-19 sehingga sangat mempengaruhi mobilitas masyarakat dalam bekerja. Sehingga perekonomian sangat buruk dan sangat berdampak dalam kehidupan masyarakat di Kecamatan Siempat Nempu Hilir sehingga penerima bantuan tersebut menjadi semakin meningkat melalui BPNT inilah salah satu langkah yang ditempu pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat serta membantu masyarakat yang tergolong dalam perekonomian yang lemah.

Berdasarkan uraian diatas maka peneliti tertarik melakukan penelitian dengan judul “ Evaluasi Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) di Kecamatan Siempat Nempu Hilir Kabupaten Dairi.”

1.2 Rumusan Masalah

1. Bagaimana dampak yang diterima masyarakat terkait perubahan mekanisme penyaluran BPNT tersebut di Kecamatan Siempat Nempu Hilir Kabupaten Dairi.
2. Bagaimana Evaluasi program BPNT di Kecamatan Siempat Nempu Hilir Kabupaten Dairi

1.3 Tujuan Penulisan

Tujuan dilakukannya penelitian yakni untuk:

1. Melihat Bagaimana dampak yang diterima masyarakat terkait perubahan mekanisme penyaluran BPNT tersebut di Kecamatan Siempat Nempu Hilir Kabupaten Dairi.
2. Melihat bagaimana Evaluasi program BPNT Di Kecamatan Siempat Nempu Hilir Kabupaten Dairi.

1.4 Manfaat Penelitian

Ditinjau dari segi manfaat, maka penelitian ini didasarkan pada 2 jenis yakni:

1. Secara Teoritis

Hasil penelitian diharapkan dapat menjadi sumber referensi dan pertimbangan untuk pihak-pihak tata laksana Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) dan perkembangan program tersebut yang disesuaikan dengan kebutuhan

masyarakat. dapat dijadikan acuan dan bahan pendukung untuk penelitian sejenis dimasa mendatang.

2. Secara praktis

a. Untuk Peneliti

Diharapkan hasil penelitian dapat memberikan ilmu pengetahuan terkait dengan tata laksana Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) di Kecamatan Siempat Nempu Hilir Kabupaten Dairi.

b. Bagi Instansi

Penelitian ini diharapkan dapat menyumbangkan pemikiran terhadap Pelaksanaan Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) di Kecamatan Siempat Nempu Hilir Kabupaten Dairi agar dapat memperbaiki kekurangan dalam penyaluran bantuan dan memenuhi prinsip penyaluran BPNT sehingga bantuan tersalurkan pada kelompok yang berbeda.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Evaluasi

2.1.1 Pengertian Evaluasi

Evaluasi berdasarkan KBBI yakni suatu bentuk nilai akhir dari proses penelitian yang positif dan negatif, dan merupakan kombinasi keduanya. Disimpulkan lebih sederhana, yakni suatu langkah atau cara yang dilakukan dalam sebuah kegiatan guna memberikan sebuah penilaian terhadap suatu hal yang akan memperoleh manfaat dari program yang dievaluasi.

Menurut Arikunto(2018:314) evaluasi program adalah suatu rangkaian kegiatan yang dilakukan dengan sengaja untuk melihat tingkat keberhasilan program.

2.1.2 Konsep Evaluasi program

Evaluasi merupakan rangkaian program atau kegiatan-kegiatan yang akan dilakukan dan dilaksanakan dengan sadar untuk mengetahui sejauh mana tingkat suatu program mencapai keberhasilannya.

Jadi berdasarkan beberapa pendapat para ahli diatas, dapat ditarik kesimpulan bahwasanya evaluasi program merupakan salah satu aktivitas yang telah direncanakan guna mengetahui sejauh mana suatu program telah berjalan dan sejauh mana tingkat keberhasilan dari program tersebut, evaluasi bukanlah suatu program yang dapat dikatakan berhasil atau berjalan sebagaimana mestinya

2.1.3 Tujuan Evaluasi Program

Tujuan dari diadakannya Evaluasi Program berdasarkan pemikiran

Wirawan (2016:30-33):

- a. Mengukur pengaruh program terhadap masyarakat.
- b. Menilai apakah program telah dilaksanakan sesuai dengan rencana.
- c. Mengukur apakah pelaksanaan program sesuai dengan standar.
- d. Memenuhi ketentuan undang-undang.
- e. Mengambil keputusan mengenai program.
- f. Memberikan kepada pimpinan dan staf program.

2.1.4 Manfaat Evaluasi Program

Manfaat evaluasi program adalah dimana untuk mengetahui dan memperbaiki apa yang salah dari program tersebut dan akan dilakukan pembaikan dan melakukan suatu perubahan dalam program tersebut agar program tersebut lebih berguna bagi masyarakat, dan juga untuk mengetahui bagaimana program tersebut berjalan dengan efektif dan efisien atau tidak.

Manfaat Evaluasi Program sebagai suatu kegiatan supervise. Secara singkat supervise adalah suatu upaya yang dilakukan untuk mengadakan tinjauan untuk memberikan pembinaan maka evaluasi program merupakan suatu tahap pertama dalam supervisi, yakni dengan mengupayakan data-data terkumpul kemudian dilanjutkan dengan pembinaan. Evaluasi program adalah suatu langkah awal dalam sebuah proses akreditasi dan validasi suatu lembaga (Arikunto,2014)

2.1.5 Sasaran Evaluasi Program

Sasaran evaluasi guna mengetahui sarannya, maka langkah pertama yang dilakukan oleh seorang evaluator adalah dengan mengenali terlebih dahulu tentang program yang hendak dijalankan, terutama komponen. Karena hal itu adalah hal yang utama dari suatu program. Tujuan umum dari sebuah program

harus dijabarkan menjadi sebuah tulisan khusus maka sasaran dari evaluator akan diarahkan kepada komponen agar pengamatannya dapat lebih cermat dan data yang dikumpulkan lebih lengkap. Untuk itulah seorang evaluator harus memiliki kemampuan untuk mengidentifikasi komponen program yang akan di evaluasi

2.1.6 Model Evaluasi Program

Ada beberapa model evaluasi kebijakan yang digunakan sebagai suatu ciri yang akan dipakai dalam memberikan penilaian. Ada beberapa model evaluasi dalam pelaksanaan suatu kebijakan yang digunakan dari berbagai kalangan tokoh antara lain adalah William Dunn.

- Model Evaluasi William Dunn

Dunn mengemukakan bahwa suatu evaluasi dapat diartikan sebagai suatu taksiran yang memberi angka dan nilai. Evaluasi memiliki kaitan dengan pengumpulan informasi mengenai suatu nilai atau kegunaan dari perolehan kebijakan dalam menyampaikan informasi yang terpercaya mengenai kerja atau peraturan umum (Dunn, 2003: 607-633).

Berikut merupakan Ciri-ciri dalam mengevaluasi kebijakan suatu program:

- a) Efektivitas dari kata dasar efektif yang memiliki arti pencapaian akan sebuah keberhasilan guna mencapai keinginan yang telah ditentukan. Efektivitas mengandung hubungan saling terkait dengan hasil yang sungguh-sungguh ingin diraih.
- b) Efisiensi mengandung arti jumlah usaha yang dibutuhkan dalam mencapai tingkatan tentang seberapa efektif. Efisiensi juga memiliki persamaan arti dengan rasionalitas ekonomi, dua kata tersebut saling keterkaitan antara efektivitas dan hal yang sungguh-sungguh dilakukan dan biasanya tolak ukur dari sebuah efisiensi adalah ongkos atau tariff biaya yang perlu dikeluarkan. Suatu kebijakan dikatakan memenuhi efektivitas yang tinggi apabila dalam hal biaya menggunakan biaya terendah maka dapat dikatakan telah efisien.
- c) Perataan disini mengandung arti sebuah kegunaan dan tarif ongkos yang dari suatu kegiatan yang berkaitan dengan program, dan apakah suatu hal

yang termuat dalam program telah dibagikan sesuai dengan porsi yang sama untuk kalangan-kalangan yang terlibat di dalamnya.

- d) Ketepatan mengandung arti seseorang yang dapat memberikan sebuah petunjuk untuk melakukan sebuah tindakan pada program terkait sesuai dengan tujuan awal yang diharapkan, atau ketepatan juga dapat dikatakan bahwa dari sebuah program yang terlaksana dari sebuah keputusan pemerintah apakah hasil yang tercapai dapat memenuhi kebutuhan masyarakat dengan baik.
- e) Ketepatangunaan/Kecukupan adalah dengan terpenuhinya suatu kebutuhan yang bisa memberi rasa puas tentang segala sesuatu yang diinginkan. Ketepatangunaan juga dapat diartikan sebagai suatu tindakan untuk mengetahui suatu tindakan yang berasal dari sebuah kebijaksanaan dalam memenuhi tujuan atau kelebihan dari suatu kegunaan kepada target.
- f) Responsivitas adalah suatu tindakan dari dalam pikiran kita untuk memahami dan mengerti tindakan dari pemerintah guna melaksanakan sebuah pelayanan. Tingkat kepekaan dapat dilihat dari pencapaian hasil oleh pemerintah untuk menjalin sebuah hubungan dalam pelaksanaan sebuah kebijakan. Responsivitas juga memberikan pengertian hasil dari keputusan pemerintah apakah telah mencapai tujuan yang ditargetkan.

2.2 Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT)

2.2.1 Pengertian Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT)

Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) adalah bantuan sosial pangan dalam bentuk non tunai dari pemerintah yang diberikan kepada Keluarga Penerima Manfaat (KPM) setiap bulannya melalui mekanisme akun elektronik yang digunakan hanya untuk membeli bahan pangan di pedagang bahan pangan/ e-warong yang bekerja sama dengan bank yang sesuai dengan Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2018 Tentang Penyaluran Bantuan Pangan Non Tunai.

2.2.2 Konsep Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT)

Dalam menjalankan program BPNT terdapat standart operasional prosedur (SOP). SOP adalah dokumen yang berkaitan dengan prosedur yang dilakukan secara kronologis untuk menyelesaikan suatu pekerjaan yang bertujuan untuk

memperoleh hasil kerja yang paling efektif dari para pekerja dengan biaya yang serendah rendahnya. SOP dalam program BPNT adalah:

a. Persiapan

Persiapan merupakan tahap awal kegiatan setelah Kementerian Sosial menetapkan bank penyalur BPNT. Koordinasi Pelaksanaan :

1) Koordinasi di tingkat pemerintahan pusat

Koordinasi di tingkat pemerintah pusat dilakukan antara Kementerian Sosial sebagai Pengguna Anggaran (PA) Program BPNT dengan Kementerian/Lembaga (K/L) terkait melalui forum Tim Koordinasi Bansos Pangan Pusat dan dilaporkan atau dikonsultasikan kepada Tim Pengendali. Koordinasi dengan kementerian dan lembaga dilakukan untuk memperoleh masukan dan arahan terkait dengan pelaksanaan program. Koordinasi juga dilakukan untuk memastikan dasar hukum, mekanisme pelaksanaan di lapangan, serta berbagai prosedur administrasi lainnya.

2) Koordinasi di tingkat pemerintah provinsi

Pemerintah provinsi melalui forum Tim Koordinasi Bansos Pangan Provinsi melakukan koordinasi secara berjenjang dengan Tim Koordinasi Bansos Pangan Kabupaten/Kota terkait seluruh tahap pengelolaan dan pelaksanaan Program BPNT di Kabupaten/Kota, mulai dari dukungan pendanaan melalui APBD, koordinasi pagu dan data KPM, sosialisasi, penanganan pengaduan, pemantauan dan dukungan lain yang diperlukan terkait BPNT.

3) Koordinasi di tingkat pemerintah kabupaten/kota

Pemerintah kabupaten/kota melakukan koordinasi dengan bank penyalur. Kemudian pemerintah Kabupaten/Kota memberikan dukungan sarana dan prasarana, edukasi dan sosialisasi, kemudahan perizinan atau keringanan biaya perizinan serta fasilitas perpajakan kepada e-warong. Pelaksanaan Program BPNT di tingkat Kabupaten/Kota dikoordinasi oleh Tim Koordinasi Bansos Pangan Kabupaten/Kota. Pelaksanaan di tingkat Kecamatan dikoordinasi oleh Tim Koordinasi Bansos Pangan Kecamatan. Pelaksanaan ditingkat desa/kelurahan didukung oleh perangkat desa setempat serta pendamping program BPNT.

b. Penyerahan Data Penerima Manfaat

1. Jumlah Peyaluran BPNT tingkat provinsi dan kabupaten/kota merujuk pada keputusan menteri sosial yang akan disampaikan seluruh Gubernur dan Bupati/Walikota melalui surat menteri sosial.
2. Data nama dan alamat keluarga penerima manfaat untuk penyaluran BPNT yang bersumber dari DT-PPFM
3. Data nama dan alamat keluarga penerima manfaat untuk penyaluran BPNT diserahkan kepada Bank Penyalur.
4. Data nama dan alamat keluarga penerima manfaat untuk penyaluran BPNT dari kementerian social diserahkan kepada Bank Penyalur ke Bupati/Walikota
5. Kepesertaan KPM pada program BPNT dapat berganti karena meninggal, pindah keluar kota, KPM yang menolak dan tercatat ganda

6. Data nama dan alamat keluarga penerima manfaat untuk penyaluran BPNT sudah diberikan penanda untuk KPM penerima PKH.

c. Persiapan e-Warong

Hal-hal yang perlu dipersiapkan Bank Penyalur dalam menetapkan agen bank, pedagang atau pihak lain untuk menjadi e-warong dalam penyalur BPNT, sedikitnya mencakup beberapa hal sebagai berikut:

1. Memastikan jumlah dan sebaran e-warong di setiap lokasi penyaluran. Bank Penyalur harus merekrut e-warong dengan rasio e-warong dengan KPM 1:250 dan minimum 2 (dua) e-warong dalam satu desa/ kelurahan tidak terbatas pada agen Bank Penyalur tersebut. Pelaporan rasio e-warong dengan KPM dilakukan selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kalender sebelum penyaluran tahap pertama.
2. Memberikan layanan perbankan kepada e-warong, termasuk diantaranya: pembukaan rekening tabungan, pendaftaran menjadi agen Laku Pandai atau LKD, dan layanan usaha lainnya.
3. Melakukan upaya edukasi dan sosialisasi, pemasaran/branding, perbaikan fasilitas e-warong dan lainnya untuk melayani KPM.
4. Memastikan kelancaran pelaksanaan pembelian bahan pangan dengan menggunakan Kartu Kombo, termasuk:
5. Memastikan ketersediaan jumlah mesin pembaca kartu kombo pada e-warong untuk memproses pembelian bahan pangan oleh KPM.
6. Melakukan edukasi penggunaan mesin pembaca kartu kombo e-warong dan memastikan e-warong siap melayani.

7. Menyediakan dukungan teknis dan pemantauan berkala terhadap kelancaran operasional alat transaksi.
8. Menyediakan petugas bank (Asisten Branchless Banking-ABB, Contact Person) yang dapat dihubungi oleh e-warong guna kelancaran dan kemudahan pelaksanaan pembelian bahan pangan.
9. Bank Penyalur setempat menyampaikan daftar e-warong kepada Tim Koordinasi Bansos Pangan setempat dan Kontak Informasi.

d. Sasaran Edukasi dan Sosialisasi

Kegiatan edukasi dan sosialisasi merupakan salah satu kegiatan inti dalam mekanisme penyaluran BPNT. Pelaksanaan dan Sasaran Edukasi dan Sosialisasi.

1) Tujuan pelaksanaan edukasi dan sosialisasi Program BPNT adalah:

- a. Memberikan pemahaman kepada para pemangku kepentingan baik pusat dan daerah mengenai kebijakan dan Program BPNT.
- b. Memberikan pemahaman kepada KPM tentang tujuan dan mekanisme pemanfaatan Program BPNT.
- c. Memberikan informasi tentang mekanisme pengaduan Program BPNT.

2) Sasaran dari pelaksanaan edukasi dan sosialisasi program BPNT adalah:

- a. Kementerian atau Lembaga terkait.
- b. Pemerintah daerah, termasuk Tim Koordinasi Bansos Pangan Provinsi dan Kabupaten/Kota.
- c. Organisasi Perangkat Daerah (OPD) tingkat Kecamatan.
- d. Perangkat desa/kelurahan dan jajarannya

- e. Pendamping Program BPNT, antara lain: Koordinator Tenaga Kesejahteraan Sosial (TKS), Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK), Koordinator dan Pendamping Program Keluarga Harapan (PKH) dan pendamping sosial lainnya serta perangkat kelurahan atau desa.
- f. Keluarga Penerima Manfaat (KPM).
- g. Pemilik atau Pengelola e-warong.
- h. Bank Penyalur maupun Bank Acquirer (Bank yang melakukan kerjasama dengan pedagang sehingga pedagang mampu memproses transaksi dari Alat Pembayaran Menggunakan kartu/uang elektronik yang diterbitkan oleh pihak selain Acquirer yang bersangkutan serta bertanggung jawab atas penyelesaian pembayaran kepada pedagang) baik ditingkat pusat maupun cabang.

3) Pelaksana Edukasi dan Sosialisasi. Pelaksana edukasi dan sosialisasi dalam pelaksanaan Program BPNT, terdiri dari:

- a. Pemerintah: Sosialisasi dilakukan oleh pemerintah secara berjenjang sesuai tugas, fungsi dan kewenangannya.
- b. Bank Penyalur.
- c. Pemilik/Pengelola e-warong.
- d. Registrasi dan/atau Pembukaan Rekening Penerima Kartu Kombo Kartu Kombo merupakan uang elektronik yang dipakai untuk menukar bantuan pangan berupa beras dan telur. Proses Registrasi dan/atau pembukaan rekening penerima Kartu Kombo terdiri dari :

1. Proses 1

Bank penyalur melakukan registrasi atau pembukaan rekening secara kolektif atas data yang diberikan dan ditetapkan oleh kementerian sosial berdasarkan DT-PPFM.

2. Proses 2

Bank penyalur melakukan distribusi Kit Kartu Kombo kepada KPM. Dalam kegiatan ini, pendamping juga melakukan pendampingan proses distribusi Kit Kartu Kombo. Proses ini dapat dilakukan bersamaan dengan kegiatan edukasi dan sosialisasi kepada KPM.

3. Proses 3

Bank penyalur menyampaikan laporan dengan format buku antar bank dan dashboard Program BPNT kepada Kementerian Sosial dan Tim Pengendali.

e. Penyaluran

Proses penyaluran bantuan, terdiri dari:

- a. Bank Penyalur membukakan Akun Elektronik Bantuan Pangan untuk masing-masing KPM berdasarkan Daftar KPM Perubahan yang diterima dari Kementerian Sosial.
- b. Bank Penyalur melakukan pemindahan buku dana Bantuan Sosial dari rekening Kementerian Sosial di Bank Penyalur ke rekening KPM.
- c. Rekening KPM digunakan untuk menampung seluruh program Bantuan Sosial yang diterima oleh KPM dan dapat dibedakan penggunaannya untuk masing-masing program Bantuan Sosial.

- d. Kementerian Sosial memberikan perintah pembayaran kepada Bendahara Umum Negara/Daerah sebagai dasar untuk pencairan dana BPNT.
- e. Bendahara Umum Negara/Daerah melakukan pencairan dana dari rekening kas umum negara/daerah kepada rekening Kementerian Sosial di Bank Penyalur sesuai perintahpembayaran yang diterbitkan oleh Kementerian Sosial.
- f. Bank Penyalur menyampaikan laporan hasil penyaluran dana bantuan sosial kepada Kementerian Sosial dengan tembusan kepada Tim Pengendali.
- g. Bank Penyalur memberikan informasi kepada pemerintah daerah mengenai dana Bantuan Pangan yang sudah ditransfer ke rekening BPNT KPM.
- h. Transfer dana BPNT ke rekening BPNT KPM dijadwalkan setiap tanggal 25 (dua puluh lima).
- i. Bank memastikan sistem uang elektronik tidak berubah setiap periode
- j. penyaluran sehingga kode transaksi di mesin EDC tidak berubah.

g. Pemanfaatan

Proses pemanfaatan dana bantuan dapat digambarkan sebagai berikut :

1. Datang; KPM membawa Kartu Kombo datang ke e-warong yang bertanda khusus Non Tunai dan sudah bekerja sama dengan Bank Penyalur.
2. Cek; Lakukan cek kuota bantuan pangan melalui mesin EDC.

3. Pilih; Pilih jenis bahan pangan beras dan/atau telur dengan jumlah sesuai kebutuhan, lakukan pembelian dengan memasukan nominal harga dan PIN pada EDC bank.
4. Terima; Terima bahan pangan yang telah dibeli serta bukti transaksi untuk disimpan.

2.3 Penelitian Terdahulu

Kajian terhadap penelitian terdahulu adalah memnerikan acuan dan landasan kerangka berpikir untuk mengkaji masalah yang menjadi sasaran dari sebuah penelitian. Penelitian terdahulu diambil dari berbagai penelitian yang berhubungan dengan Evaluasi Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT).

Berikut beberapa penelitian terdahulu yang terkait permasalahan yang akan diteliti oleh penulis yakni:

Tabel 2.1
Penelitian Terdahulu

No	Nama Penulis	Judul Penelitian	Hasil Penelitian	Perbedaan antara penulis dengan penelitian sebelumnya
1.	Yeen Gustianc e (2019)	Evaluasi pelaksanaa Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) Dalam Mendorong Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Sustainable Development Goals/SDGS) Di Kota Bandar Lampung (kualitatif).	Hasil pelaksanaan BPNT berdasarkan tujuan program belum optimal karena terjadi peningkatan maslah saldo nol dan permasalahan teknis pelaksanaan tidak sesuai. Selain itu aspek efektivitas tujuan masih kurang baik, efisiensi waktu penyaluran dan jumlah E-warong yang belum baik, renposiivitas permasalahan lambat,	Peneliti sebelumnya membahas hasil evaluasi BPNT dikota bandar lampung dan penelitian penulis membahas evaluasi BPNT di kecamatan Siempat Nempu hilir Kabupaten Dairi.

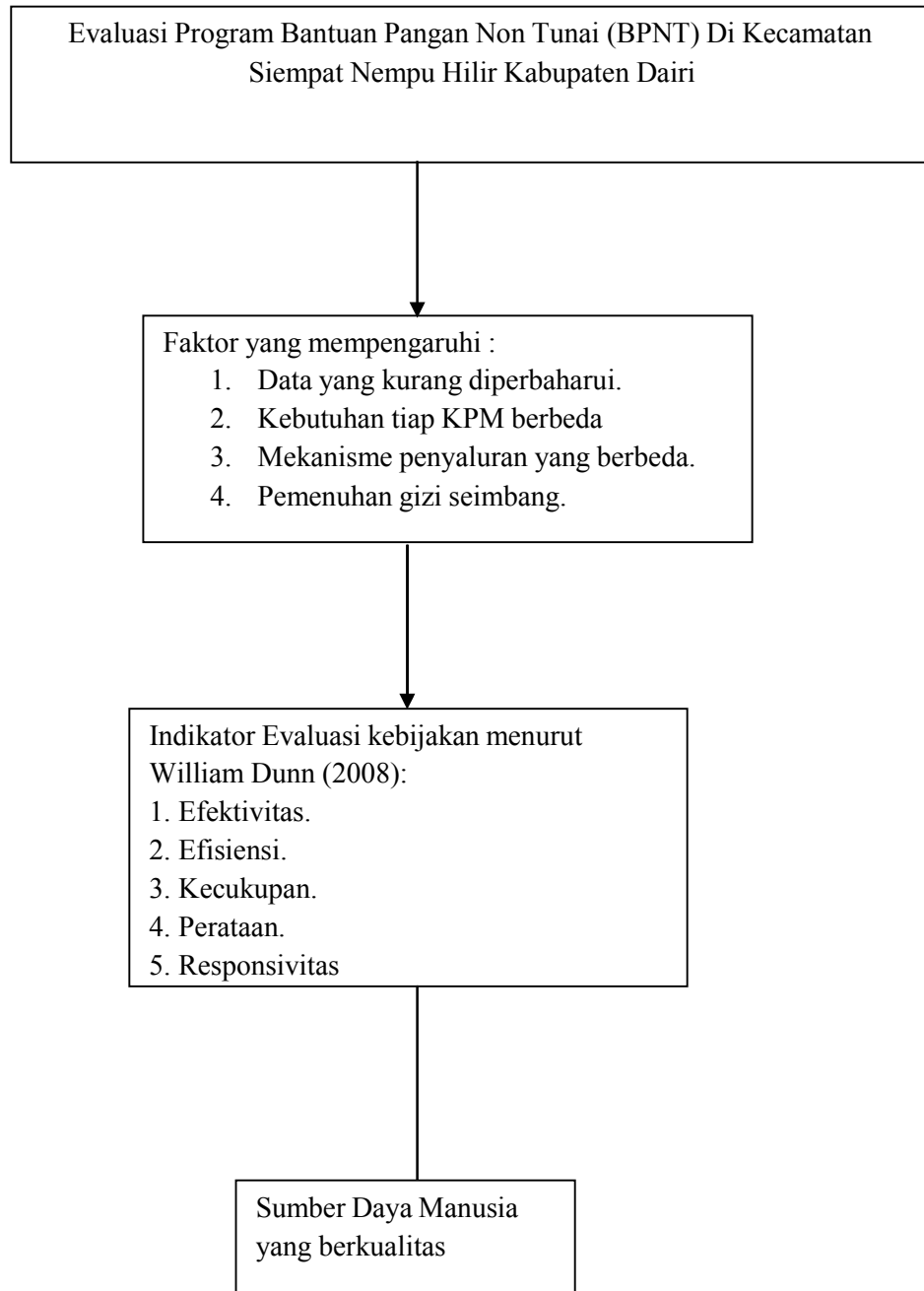
			dan perantaraan penerima masih kurang baik.	
2.	Ibnu Sazime Arief (2017)	Evaluasi Pelaksanaan Program Raskin Di Kelurahan Maharatu Kota Pekanbaru (kualitatif).	Hasil penelitian terdapat penyimpangan dalam pelaksanaan program Raskin, terlihat dari waktu penyaluran raskin yang tidak dilaksanakan setiap bulannya, jumlah Raskin yang diterima RTM hanya 5-10 kg setiap periode penyaluran, tidak tersedianya anggaran dalam penyaluran raskin karena tidak memiliki identitas sebagai warga kelurahan Maharatu dan masih ada nepotisme yang terjadi dalam pendataan RTM sebagai penerima Raskin.	Peneliti sebelumnya membahas hasil evaluasi program Raskin di kota Pekanbaru dan penelitian penulis membahas evaluasi BPNT di kecamatan Siempat Nempu hilir Kabupaten Dairi.
3.	Benny Rachman, Adang Agustian dan Wahyudi (2018)	Efektivitas dan Perspektif Pelaksanaan Program Beras Sejahtera (Rastra) dan Bantuan Pangan Non Tunai di Surabaya (kualitatif)	Penelitian ini mengkaji efektivitas pelaksanaan Rastra dan BPNT (aspek 6T: Tepat Sasaran, Tepat Jumlah, Tepat Waktu, Tepat Administrasi, Tepat Harga dan Tepat Kualitas) dan merumuskan sarana kebijakan perbaikan pelaksanaan Rastra dan BPNT. Cakupan kajian dan data yang digunakan adalah tingkat nasional dengan keterwakilan dari masing-masing kota pelaksanaan program.	Peneliti sebelumnya membahas hasil evaluasi Program Rastra & BPNT sementara penelitian penulis membahas evaluasi BPNT di kecamatan Siempat Nempu hilir Kabupaten Dairi.

2.4 Kerangka Berpikir

Untuk mengetahui lebih dalam tentang pelaksanaan bantuan pangan dan mengetahui faktor-faktor pengubah mekanisme perubahan penyaluran BPNT di Kecamatan Siempat Nempu Hilir Kabupaten Dairi, maka penulis menggunakan teori evaluasi kebijakan William Dunn dengan indikator efektivitas, efisiensi, kecukupan, perataan, responsivitas dan ketepatan karena kebijakan ini melahirkan sebuah program dan masih dalam proses pelaksanaan.

Dengan teori tersebut, maka penulis akan meninjau mekanisme penyaluran BPNT di kecamatan siempat nempu hilir kabupaten dairi tersebut apakah penyaluran BPNT tersebut sudah efektif dan efisien sesuai dengan juknis Nomor 29/6/SK/HK.01/2/2022 dan penyalurannya apakah sudah tepat dan mempermudah masyarakat dalam pengambilan bantuan tersebut dan apakah dengan perubahan mekanisme tersebut sangat membantu masyarakat dalam membeli kebutuhannya masing-masing tanpa harus menukarkan saldo menjadi sembako yang sudah ditetapkan oleh E-Warong karena setiap masyarakat mempunyai kebutuhan yang berbeda sehingga masyarakat bebas menggunakan uang tersebut untuk kebutuhan mereka. Dari penjelasan di atas maka penulis akan menyederhanakan kerangka berfikir melalui sebuah bagan yang digambarkan sebagai berikut:

Tabel 2.2
Bagan Kerangka Berfikir



BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif yang bertujuan untuk memahami gejala-gejala yang tidak memerlukan kuantifikasi. Menurut John W. Craswell dalam buku *Research Design*, penelitian kualitatif merupakan:

Menurut John W. Creswell dalam buku *Research Design*, penelitian kualitatif merupakan: “Metode penelitian kualitatif merupakan salah satu jenis metode untuk mendeskripsikan, mengeksplorasi dan memahami pada makna yang oleh sejumlah individu atau sekelompok orang dianggap berasal dari masalah sosial atau kemanusiaan. Proses penelitian kualitatif melibatkan upaya-upaya penting, seperti mengajukan pertanyaan-pertanyaan dan prosedur-prosedur, mengumpulkan data yang spesifik dari partisipan, menganalisis data secara induktif mulai dari tema-tema yang khusus ke tema-tema yang umum, dan menafsirkan makna data. Laporan akhir untuk penelitian ini memiliki struktur atau kerangka yang fleksibel. Siapapun yang terlibat dalam bentuk penelitian ini harus menerapkan cara pandang penelitian yang bergaya induktif, berfokus terhadap makna individual, dan menerjemahkan kompleksitas suatu persoalan”. (Creswell 2013:4-5).

Penelitian yang penulis lakukan mendeskripsikan bagaimana evaluasi kebijakan Bantuan Pangan Non Tunai dikecamatan Siempat Nempu Hilir Kabupaten Dairi. Peneliti secara langsung terjun ke lapangan untuk melakukan wawancara dengan responden di Kecamatan Siempat Nempu Hilir Kabupaten Dairi.

3.2 Lokasi dan waktu Penelitian

Lokasi penelitian akan dilaksanakan di Kecamatan Siempat Nempu Hilir, Desa Jambur Indonesia, Desa Sopobutar, Desa simungun, Desa Lae Sering. Adapun alasan peneliti memilih lokasi penelitian ini adalah karena lokasi tersebut menjadi sasaran penyaluran program BPNT, dan juga karena lokasi tersebut mungkin lebih merupakan lokasi yang lebih mudah untuk diteliti oleh penulis dan ada juga desa yang menjadi penerima BPNT terbanyak di Kecamatan Siempat Nempu Hilir dan peneliti melakukan penelitian dari bulan Juni-Juli. Sehingga penulis tertarik untuk mengevaluasi pelaksanaan program BPNT di Desa-Desa tersebut.

JADWAL KEGIATAN PENELITIAN & PENULISAN SKRIPSI

No	Kegiatan	Waktu Penelitian																													
		Jan-22		Feb-22				Mar-22				Apr-22				Mei-22				Jun-22				Jul-22				Agu-22			
		3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
1	Pengajuan Judul	■	■																												
2	Acc Judul			■																											
3	Persetujuan Pembimbing				■																										
4	Bahan Literatur				■	■																									
5	Penyusunan Proposal					■	■																								
6	Bimbingan Proposal							■	■	■	■																				
7	Seminar Proposal											■	■																		
8	Revisi Proposal													■																	
9	Pengumpulan Data (Penelitian)															■	■														
10	Pengolahan dan Analisis Data																■	■	■												
11	Bimbingan Skripsi																		■	■	■	■									
12	Periksa Buku																														
13	Penggandaan dan Tanda Tangan																											■	■		
14	Ujian Meja Hijau																														

3.3 Informan Penelitian

Informan dalam penelitian dalam penelitian kualitatif adalah individu atau kelompok masyarakat yang mengetahui tentang tujuan atau arah dari sebuah penelitian, informan yang dipilih adalah mereka yang diyakini benar-benar mampu mengetahui tentang tujuan dari sebuah program yang akan penulis akan kaji, teknik dalam memperoleh informan menggunakan teknik *purposive sampling*, yaitu suatu metode atau cara menentukan seorang informan dengan cara menentukan sendiri gambaran dan ciri khas yang menunjukkan tanda-tanda bahwa individu tersebut mengetahui permasalahan terkait program dan dapat menjawab segala pertanyaan terkait perubahan mekanisme penyaluran BPNT . penulis membagi informan menjadi dua bagian yakni:

- a) Camat Siempat Nempu Hilir Kabupaten Dairi yang menjadi informan kunci.
- b) Penerima BPNT sebagai penerima manfaat program dan peneliti melakukan wawancara terhadap penerima bantuan dari desa Sopobutar, desa Jambur Indonesia, desa Janji, dan desa Lae Sering yang berjumlah empat orang

3.4 Jenis dan Teknik Pengumpulan Data

Jenis data yang diperlukan dalam penelitian ini adalah :

- **Data Primer**

Data primer adalah jenis data yang diperoleh secara langsung dari sumber aslinya dan dilakukan melalui kegiatan penelitian secara langsung ke lokasi penelitian untuk mencari data-data yang lengkap dan berkaitan dengan masalah yang diteliti. Teknik pengumpulan data primer ini dilakukan dengan cara:

- a) Wawancara, yaitu kegiatan yang dilakukan untuk memperoleh data yang lengkap dan mendalam dari para informan. Pengumpulan data dilakukan melalui pertanyaan secara lisan kepada informan.

- **Data Sekunder**

Data sekunder merupakan jenis data yang diperoleh melalui berbagai informasi yang telah ada sebelumnya dan sengaja dikumpulkan oleh peneliti yang digunakan untuk melengkapi kebutuhan data penelitian. Adapun bentuk pengumpulan data sekunder yang dilakukan adalah:

- a) Kepustakaan, yaitu teknik pengumpulan data dengan menggunakan berbagai literatur seperti buku, karangan ilmiah, dan sebagainya.

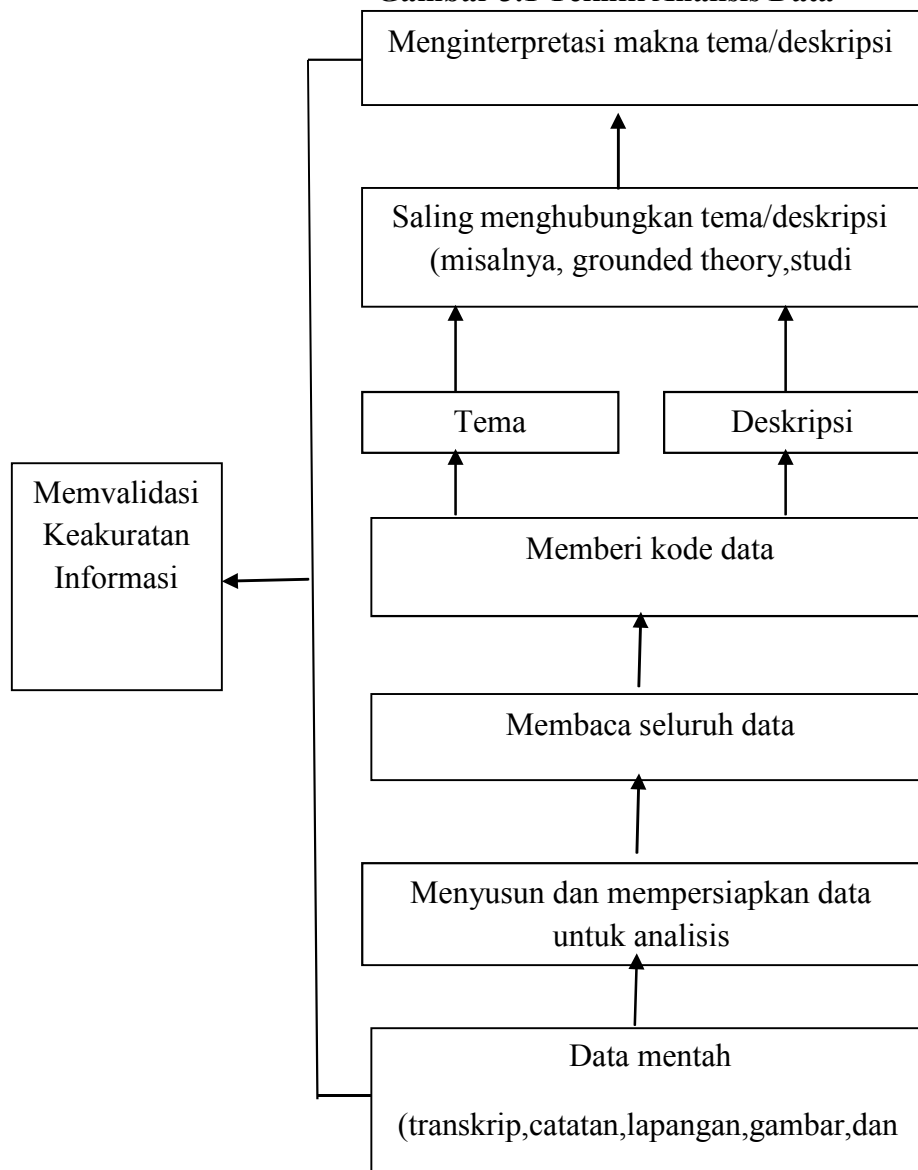
- b) Dokumentasi, yaitu teknik pengumpulan data dengan menggunakan catatan-catatan atau dokumen yang ada dilokasi penelitian serta sumber-sumber lain yang dianggap relevan dengan objek penelitian.

3.5 Teknik Analisa Data

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan bahan-bahan lain, sehingga dapat dipahami dengan mudah, dan temuannya dapat diinformasikan kepada orang lain. Analisis data dilakukan dengan mengorganisasikan data, menjabarkan ke dalam unit-unit, melakukan sintesis, menyusun ke dalam pola, memilih mana yang penting untuk dipelajari, dan membuat kesimpulan yang dapat diceritakan kepada orang lain.

Langkah-langkah teknik analisa data :

- Data mentah (transkripsi, data tangan, dan sebagainya)
- Mengolah dan mempersiapkan data untuk dianalisis.
- Membaca keseluruhan data.
- Menganalisis lebih detail dengan meng-coding data.
- Menerapkan proses koding untuk mendeskripsikan setting orang, kategori dan tema yang akan dianalisis.
- Menunjukkan bagaimana deskripsi dan tema yang akan disajikan kembali dengan narasi atau laporan kualitatif.
- Menginterpretasi makna tema/deskripsi

Gambar 3.1 Teknik Analisis Data

Sumber : John W. Creswell (2017 : 263)

Dalam penjelasan gambar diatas penyajian dimulai dari bawah keatas. Dalam praktiknya pendekatan tersebut lebih interaktif, beragam tahap saling berhubungan dan tidak harus selalu sesuai dengan susunan yang telah disajikan. Dari data mentah dilakukan pengolahan data dan mempersiapkan data

untuk dapat dianalisis ditempat penelitian yang melibatkan transkrip wawancara men-scanning materi, mengetik data lapangan, atau memilah-milah dan menyusun data tersebut kedalam jenis- jenis yang berbeda tergantung pada sumber informasi. Dalam menyusun dan mempersiapkan data untuk analisis harus sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh peneliti. Setelah disusunnya dan mempersiapkan data maka harus diteliti kembali, agar tidak adanya kesalahan baik dalam penulisan dan juga dapat memberikan kode dari setiap data – data yang telah disusun agar dengan mudah dipahami kembali oleh peneliti.

Setelah itu munculnya tema dari penelitian tersebut yang dapat mempermudah dalam mendeskripsikan dan pemaparan data yang saling berhubungan antara tema dan deskripsi teori – teori yang dipaparkan. Dan juga menginterpretasikan makna dari tema/deskripsi tersebut agar tidak adanya kekeliruan dalam pembuatan dan penyajian data dan setelahnya memvalidasi keakuratan informasi sehingga peneliti dapat mengambil makna dari setiap analisis data yang telah dilakukan.

